

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Semarang: Universitas Atma Jaya.
- 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- 2001. *Masalah Penegakan Hukum–Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- R. Soesilo. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politie.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan*, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

B. Jurnal

- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 17 Juli 2024.
- Dony Tarmizi, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)”, *Jurnal Hangoluan Law Review* Volume 1 Nomor 1 Mei 2022, 2022.
- Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014. <https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim-pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkotika>
- Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf>, tanggal akses 17 Juli September 2024.

- Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009), diakses melalui <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/52>, tanggal akses 17 Juli 2024.
- Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muhammad Ridwan Lubis, “Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan*, 2022.
- Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Panji Lazuardi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo)”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2021.
- Reza Nurul Ichsan dkk, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN. Tpg)”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022.
- Rifki Asrofi, “Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 3 Agustus 2024, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 2024.
- Sintia Citra Dewi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018.
- Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015, Universitas Sam Ratulangi, 2015.

Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, diakses melalui <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c0701fb73000fce15bd/mediasi-penal-di-indonesia>, tanggal akses 17 Juli 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

-----Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

-----Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

-----Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

D. Internet

Albert Aries, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51af4a610def0/penerapan-Pasal-64-dan-Pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana>. Diunduh tanggal 15 Juli 2024.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 17 Juli 2024, Pukul 11:07 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 17 Juli 2024, Pukul 09:50 WIB

<https://kbbi.web.id/palsu> diakses pada tanggal 15 Juli 2024.